

POTENSI, TANTANGAN MODEL SOLUSI MENSEJAHTERAKAN RAKYAT ACEH UTARA DARI ASPEK EKONOMI

Zainuddin*) Iba dan Sutoyo*)

*)Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kebangsaan Bireuen
Email : zainuddiniba@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh utara 2). Menganalisis Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Belanja Daerah Terhadap PAD Kabupaten Aceh Utara 3) Analisis Location Quotient LQ. Penelitian dilakukan dengan metode Statistik berdasarkan data historis. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Hasil analisis menyimpulkan 1) Desentralisasi Fiskal Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap IPM Kabupaten Aceh Utara; 2) PDRB, Jumlah Penduduk Dan Belanja Daerah Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap PAD Kabupaten Aceh Utara; 3) Sektor Basis (Potensial Secara Ekonomi) Di Kabupaten Aceh Utara Adalah Sektor Pertambangan Dan Penggalian, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertanian

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Indeks Pembangunan Manusia, PDRB, Jumlah Penduduk, Belanja Daerah, PAD, Analisis Location Quotient LQ.

Pendahuluan

Kabupaten Aceh Utara memiliki penduduk terbanyak diantara Kabupaten / Kota dalam provinsi Aceh. Pada tahun 2015, penduduk Kabupaten Aceh Utara tercatat sebanyak 583.892 jiwa dengan komposisi jenis kelamin meliputi laki-laki sebanyak 288.310 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 295.582 jiwa. Selain itu rasio kepadatan penduduk Kabupaten Aceh Utara juga cukup tinggi dimana rasio kepadatan penduduknya mencapai 217 jiwa/km². Tentunya dengan kondisi demikian diharapkan memiliki dampak positif terhadap tingginya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompetensi di Kabupaten Aceh Utara.

Tingginya jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Utara juga memberi dampak besar pada peningkatan angka pengangguran, dimana jumlah pengangguran Kabupaten Aceh Utara mencapai 37.615 orang di tahun 2015. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan, dimana persaingan dalam mendapat kerja menjadi semakin sulit. Dengan kondisi ini tentu akan memberi beban ekstra kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyediakan atau membuka lapangan kerja baru sehingga mampu mengurangi angka pengangguran. Tetapi upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam membuka lapangan kerja tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh putra/i daerah, terlebih lowongan kerja yang berasal dari sektor swasta karena para pencari kerja bukan hanya berasal dari Kabupaten Aceh Utara tetapi juga Kabupaten-Kabupaten lain di Provinsi Aceh, bahkan dari seluruh Indonesia. Kondisi ini menuntut para pencari kerja (Putra/i daerah) Kabupaten Aceh Utara harus memiliki keahlian/ketrampilan yang mampuni agar dapat berkompetisi dengan pencari kerja dari daerah lainnya.

[13] Disahkannya UU Otonomi Daerah nomor 23 tahun 2014 tentang hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (PKPD) memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam memprioritaskan anggaran ke beberapa sektor yang dianggap strategis dalam mendorong pembangunan. [14] Sehingga dengan demikian ada korelasi yang baik antara perencanaan dan keberadaan

anggaran dalam upaya mengoptimalkan kebijakan terutama dalam meningkatkan IPM. Iba (2016), menyimpulkan bahwa Desentralisasi Fiskal Berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh dalam kurun waktu tahun 2010-2015. Penelitian lainnya Yulliana (2016), menyimpulkan bahwa Desentralisasi Fiskal sisi penerimaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka harapan lama sekolah perempuan, sedangkan Desentralisasi Fiskal sisi pengeluaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rata-rata lama sekolah maupun angka harapan lama sekolah laki-laki dan perempuan di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan permasalahan singkat di atas, pada kesempatan ini peneliti mencoba mengkaji pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.

Tinjauan Pustaka

1. Pendapatan Daerah

Kabupaten Aceh Utara memiliki PAD yang cukup besar dimana mencapai angka Rp.194M lebih pada tahun 2015 atau mengalami pertumbuhan hampir 6 kali lebih banyak dibanding tahun 2010 dimana PAD Aceh Utara hanya berada di angka Rp.38M saja [11]. Untuk lebih jelasnya perkembangan PAD Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1
PAD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010-2015

No	Tahun	PAD (Jutaan Rupiah)	Pertumbuhan
1	2010	38.504,-	-
2	2011	53.643,-	39,31%
3	2012	62.523,-	16,55%
4	2013	113.748,-	81,92%
5	2014	178.551,-	56,97%
6	2015	194.029,-	8,66%

Sumber : BPS Kab. Aceh Utara 2017

Dari tabel 1 terlihat bahwa perkembangan PAD Kabupaten Aceh Utara cukup menjanjikan dimana pertumbuhan terendah hanya berada di angka 8% pertahun dari tahun 2014 ke 2015, sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012- mencapai 81,92%. Angka ini cukup tinggi dan akan terus berkembang jika Pemerintah Daerah fokus pada penerimaan asli daerah. Namun walaupun PAD mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, tetapi perbandingan PAD dengan tingkat pendapatan total daerah hanya 1: 10 di tahun 2015 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2 : Perbandingan PAD Dengan Pendapatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010-2015 (dalam jutaan rupiah)

No	Tahun	PAD	Pendapatan Total	Rasio
1	2010	38.504,-	676.032,-	1:17
2	2011	53.643,-	970.646,-	1:18
3	2012	62.523,-	1.102.643,-	1:17
4	2013	113.748,-	1.362.238,-	1:11
5	2014	178.551,-	1.755.876,-	1:9
6	2015	194.029,-	1.983.478,-	1:10

Sumber: BPS Aceh Utara 2017

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa komposisi PAD Kabupaten Aceh Utara masih sangat rendah dimana komposisi tertinggi hanya 1:9 pada tahun 2014. Sedangkan lainnya masih di atas 1:10 kondisi ini cukup mengkhawatirkan melihat PAD yang dimiliki

Kabupaten Aceh Utara relatif belum mampu membayar gaji para pegawainya. Pada tahun 2015 saja belanja Pegawai mencapai 870 milyar, Jika anggaran hanya bersumber pada PAD, maka Kabupaten Aceh Utara masih belum mampu memenuhi belanja pegawai dari PADnya.

Potensi Daerah

Kabupaten Aceh Utara selama 2 dekade kebelakang dikenal dengan minyak dan gasnya yang melimpah, bahkan pada masa itu terdapat industri-industri besar yang tidak dimiliki daerah lain di Provinsi Aceh, contohnya PT AAF, PT.PIM dan PT. KKA dan lain sebagainya. Namun itu hanya cerita masa lalu, saat ini hasil minyak dan gas di Aceh Utara sudah sangat menurun, bahkan industri-industri besar tersebut saat ini sudah tidak beroperasi lagi, sehingga tidak dapat lagi digunakan sebagai andalan dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah. Gambaran Pertumbuhan Ekonomi Aceh Utara tahun 2011- 2015 sebagaimana diperlihatkan pada table 3 berikut :

Tabel 3 :
Pertumbuhan Ekonomi Aceh Utara Tahun 2011-2015

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Pertumbuhan Ekonomi	7,50%	5,38%	3,30%	4,39%	4,69%

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Utara 2017

Dari table 3 tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara mengalami penurunan yang cukup tajam, dimana hanya tahun 2011 dan 2012 berada di angka 5% sedangkan 3 tahun setelahnya berada di bawah 5%. Perkembangan PDRB Kabupaten Aceh Utara tahun 2012-2015 dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4
Perkembangan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2015

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	3916	4267	4748	5095
2	Pertambangan Dan Penggalian	8662	8393	7325	2769
3	Industri Pengolahan	2884	2664	2746	2877
4	Pengandaan Listrik Dan Gas	10	10	10	11
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah	2	2	2	2
6	Konstruksi	548	614	680	737
7	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	1380	1537	1663	1827
8	Transportasi dan Pergudangan	763	857	929	968
9	Penyedia Akomodasi Dan Makan Minum	47	54	62	69
10	Informasi Dan Komunikasi	220	224	276	288
11	Jasa Keuangan Dan Asuransi	199	209	208	221
12	Real Estate	285	323	363	387
13	Jasa Perusahaan	36	40	44	46
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial	295	316	364	415
15	Jasa Pendidikan	155	169	184	207
16	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	222	250	279	312
17	Jasa Lainnya	114	124	135	144
PDRB		19746	20080	20027	16383

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Utara 2017

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa sektor pertambangan dan penggalian terus mengalami penurunan yang sangat tajam, oleh karena itu pemerintah Kabupaten harus mencarisektor

alternative lain yang mampu mendorong PDRB Kabupaten Aceh Utara untuk menjadi lebih baik dan Optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Pengertian Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan [4]

Pengertian IPM

Menurut BPS (2017) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ialah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Menurut BPS (2014) komponen indeks manusia terdiri atas:

1. Angka Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.
2. Angka Melek Huruf
Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.
3. Rata-Rata Lama Sekolah
Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.
4. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan
UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

$$\begin{aligned}
 C(i) &= C(i) && \text{Jika } C(i) < Z \\
 &= Z + 2(C(i) - Z)^{1/2} && \text{Jika } Z < C(i) < 2Z \\
 &= Z + 2(Z)^{1/2} + 3(C(i) - 2Z)^{1/3} && \text{Jika } 2Z < C(i) < 3Z
 \end{aligned}$$

Pengertian PDRB

Menurut BPS (2017) yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan metode yaitu langsung dan tidak langsung (alokasi). Menurut BPS (2017) sektor-sektor perekonomian berdasarkan lapangan usaha yang tercakup dalam PDRB yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik gas dan air bersih, sektor bangunan dan konstruksi, sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa. BPS [3]

Pengertian PAD

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain sumber PAD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a) Hasil pajak daerah;
- b) Retribusi daerah;
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain berupa bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga;
- d) Lain-lain PAD yang sah, antara lain penerimaan daerah diluar pajak

Metode Penelitian

a. Model Korelasi IPM dengan Desentralisasi Fiskal

Analisis ini bersifat kuantitatif yaitu dengan menggunakan rumus regresi linier sederhana dan berganda dengan formulasi sebagai berikut:

$$Y = a + B X + e [5]$$

Keterangan

Y = IPM

X = Desentralisasi Fiskal

a, b = Koefisien

e = Error term

PDRB (X₁), Jumlah Penduduk (X₂) dan Belanja Daerah (X₃) Terhadap PAD (Y) Kabupaten Aceh Utara

$$Y = a + B X_1 + B X_2 + B X_3 + e [5]$$

Keterangan

Y = PAD

X₁ = PDRB

X₂ = Jumlah Penduduk

X₃ = Belanja Daerah

a, b = Koefisien

e = Error term

b. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak [6]. Untuk menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan grafik normal plot. Dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar Pengambilan Keputusan Uji Normalitas :

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode Kolmogrov-Smirnov jika hasil angka signifikansi (Sig) lebih kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal [6]

c. Uji F (Uji secara simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan koefisien variabel bebas mempunyai pengaruh nyata atau tidak terhadap variabel terikat [7]. Untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat secara bersama-sama dengan $\alpha = 0,05$. Sebagai berikut:

- Bila (P-Value) < 0,05 artinya variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen.

- Bila (P-Value) > 0,05 artinya variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen.

d. Uji t (Secara Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing sumbangan variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat, menggunakan uji masing-masing koefisien regresi variabel bebas apakah mempunyai pengaruh yang bermakna atau tidak terhadap variabel terikat[9].

Untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat secara parsial dengan $\alpha = 0,05$. Sebagai berikut:

- Bila (P-Value) < 0,05 artinya variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.
- Bila (P-Value) > 0,05 artinya variabel independen secara parsial tidak mempengaruhi variabel dependen.

e. Analisis Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Teknik ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama. Dengan mengetahui koefisien korelasi antara masing-masing variabel X dan Y maka dapat ditentukan koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya pengaruh yang ditimbulkan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus koefisien korelasi adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{\{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Pedoman interpretasi koefisien Korelasi sebagaimana disajikan dalam tabel 5 berikut :

Tabel 5
Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi[8]

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Cukup kuat
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat kuat

Pada model linear sederhana ini, akan dilihat besarnya kontribusi untuk variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya (*R square*). Jika *R square* yang diperoleh mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika (*R*²) makin mendekati 0 (nol) maka semakin lemah pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

- Jika *Kd* mendekati nol (0), berarti pengaruh variabel *independent* terhadap *dependent* lemah.
- Jika *Kd* mendekati satu (1), berarti pengaruh variabel *independent* terhadap *dependent* kuat.

f. Uji Location Quotient LQ

Location Quotient (LQ) merupakan suatu indeks untuk membandingkan rasio persentase dari total aktivitas pada sub wilayah terhadap persentase aktivitas total terhadap wilayah yang diamati. Adapun formula dari LQ [9], adalah :

$$LQ = \left(\frac{\frac{EIJ}{EJ}}{\frac{EIN}{EN}} \right)$$

Keterangan:

EIJ : PDRB Sektor I di Kabupaten

EJ : PDRB kabupaten

EIN : PDRB Sektor I Di Provinsi

EN : PDRB Provinsi

Hasil Penelitian Dan Pembahasan**A. Desentralisasi Fiskal Terhadap IPM Kabupaten Aceh Utara***Hasil Estimasi Regresi Variabel Desentralisasi Fiskal Terhadap IPM*

Hasil Estimasi Regresi variabel Desentralisasi Fiskal Terhadap IPM sebagaimana disajikan dalam tabel 6 berikut :

Tabel 6
Hasil Estimasi Regresi Variabel Desentralisasi Fiskal Terhadap IPM

Variabel	B	Standar Error	t-hitung	t-tabel	Sig
Konstanta	62.006	0.236	263.171		.000
Desentralisasi fiskal	2.383	.000	13.994	2.776	.000
Koefisien korelasi (R)			.980 ^a		
Koefisien determinasi (R ²)			.990		

Sumber: Pengolahan Data 2017 (diolah)

Dari hasil pengolahan pada tabel diatas dapat diperoleh hasil akhir model persamaan estimasi yaitu

$$Y = 62.006 + 2.383 x$$

Interpretasi dari persamaan diatas menjelaskan bahwa:

1. Konstanta A sebesar 62.006 Hal ini menunjukkan bahwa variabel independent dianggap konstan, maka desentralisasi fiskal mempunyai nilai Rp. 62.006
2. Koefisien regresi dari Desentralisasi Fiskal (X) sebesar 2.383 artinya bahwa terjadi perubahan pada desentralisasi fiskal sebesar 1 persen maka berpengaruh terhadap peningkatan IPMY sebesar 2.38%
3. Koefisien korelasi (R)0.980 menunjukkan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara variabel terikat dengan variabel bebas sebesar 98,80% artinya desentralisasi fiskal (X) mempunyai hubungan (sangat Kuat) dengan indeks pembangunan manusia (Y)
4. Koefisien determinasi (R²) sebesar .990 artinya bahwa sebesar 99% perubahan yang terjadi pada variabel terikat (IPM) dipengaruhi oleh variabel bebas (desentralisasi fiskal) sedangkan selebihnya dijelaskan oleh variabel lainnya diluar penelitian

5. Nilai T hitung (13.994) > T tabel (2.776) artinya Desentralisasi Fiskal berpengaruh Positif dan signifikan terhadap IPM Kabupaten Aceh Utara

B. PDRB, Jumlah Penduduk dan Belanja Daerah Terhadap PAD Kabupaten Aceh Utara

Hasil estimasi regresi variabel PDRB, Jumlah Penduduk dan Belanja Daerah Terhadap PAD Kabupaten Aceh Utara sebagaimana diperlihatkan pada tabel 7 berikut :

Tabel 7
Hasil estimasi regresi variabel PDRB, Jumlah Penduduk dan Belanja Daerah Terhadap PAD Kabupaten Aceh Utara

Variabel	B	Std. Error	T hitung	t-tabel	f-hitung	f-tabel	Sig
Konstanta	121163.46	2.093	.058				.959
PDRB	1.694	5.041	.336	2.776	21.764	9.55	.769
Jumlah Penduduk	-.517	4.390	-.118	2.776			.917
Belanja Daerah	.178	.198	.899	2.776			.464
Koefisien korelasi (R)		.985 ^a					
Koefisien Determinasi (R ²)		.970					

Sumber: Pengolahan Data 2017 (diolah)

Dari hasil pengolahan pada tabel diatas dapat diperoleh hasil akhir model persamaan estimasi yaitu

$$Y = 121163.46 + 1.694 X_1 - 0.517 X_2 + 0.178 X_3$$

Interpretasi dari persamaan diatas menjelaskan bahwa:

1. Konstanta A sebesar 121163.46 Hal ini menunjukkan bahwa variabel independent dianggap konstan, maka PDRB Rp. 121163.46, Jumlah Penduduk 121163.46 Jiwa dan Belanja Daerah mempunyai nilai Rp. 121163.46
2. Koefisien regresi dari PDRB(X1) sebesar 1.694 artinya bahwa terjadi perubahan pada PDRB sebesar 1 persen maka berpengaruh terhadap peningkatan PAD sebesar 1.694%
3. Koefisien regresi dari Jumlah Penduduk (X2) sebesar -.517 artinya bahwa terjadi perubahan pada Jumlah Penduduk sebesar 1 persen maka berpengaruh terhadap peningkatan PAD sebesar -.517%
4. Koefisien regresi dari Belanja Daerah(X3) sebesar .178 artinya bahwa terjadi perubahan pada Belanja Daerah sebesar 1 persen maka berpengaruh terhadap peningkatan PAD sebesar .178%
6. Koefisien korelasi (R)0.985 menunjukkan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara variabel terikat dengan variabel bebas sebesar 98,50% artinya PDRB (X1), Jumlah Penduduk (X2) dan Belanja Daerah (X3) mempunyai hubungan (sangat kuat) dengan PAD (Y)
7. Koefisien determinasi (R²) sebesar .970 artinya bahwa sebesar 97% perubahan yang terjadi pada variabel terikat (PAD) dipengaruhi oleh variabel bebas PDRB (X1), Jumlah Penduduk (X2) dan Belanja Daerah (X3) sedangkan selebihnya dijelaskan oleh variabel lainnya diluar penelitian

8. Nilai T hitung PDRB (.336) < T tabel (2.776) artinya PDRB berpengaruh Positif dan tidak signifikan terhadap PAD Kabupaten Aceh Utara
9. Nilai T hitung Jumlah Penduduk (-.118) < T tabel (2.776) artinya Jumlah Penduduk berpengaruh Negatif dan tidak signifikan terhadap PAD Kabupaten Aceh Utara
10. Nilai T hitung Belanja Daerah (.899) < T tabel (2.776) artinya Belanja Daerah berpengaruh Positif dan Tidak signifikan terhadap PAD Kabupaten Aceh Utara
11. Nilai F hitung (21.764) > F tabel (9.55) artinya secara simultan PDRB (X1), Jumlah Penduduk (X2) dan Belanja Daerah (X3) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD (Y)

Strategi Pengembangan Ekonomi Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan hasil analisis LQ, antara PDRB Provinsi Aceh dan PDRB Kabupaten Aceh Utara diperoleh hasil nilai LQ sebagaimana table 8 berikut :

Tabel 8
Hasil Analisis LQ Antara PDRB Provinsi Aceh dengan PDRB kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2015

No	Lapangan Usaha	LQ 2012	LQ 2013	LQ 2014	LQ 2015
1	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	0.77	0.80	0.88	1.07
2	Pertambangan Dan Penggalian	3.27	3.44	3.43	2.95
3	Industri Pengolahan	1.70	1.65	1.85	2.98
4	Pengadaan Listrik Dan Gas	0.48	0.50	0.49	0.62
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah	0.36	0.35	0.33	0.35
6	Konstruksi	0.33	0.36	0.38	0.47
7	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	0.49	0.53	0.56	0.71
8	Transportasi dan Pergudangan	0.51	0.55	0.60	0.74
9	Penyedia Akomodasi Dan Makan Minum	0.24	0.25	0.28	0.34
10	Informasi Dan Komunikasi	0.34	0.35	0.44	0.53
11	Jasa Keuangan Dan Asuransi	0.62	0.60	0.59	0.73
12	Real Estate	0.46	0.51	0.53	0.63
13	Jasa Perusahaan	0.34	0.36	0.39	0.47
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial	0.21	0.22	0.23	0.28
15	Jasa Pendidikan	0.43	0.45	0.47	0.57
16	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	0.51	0.54	0.59	0.72
17	Jasa Lainnya	0.50	0.53	0.56	0.68

Sumber : Pengolahan Data 2017

Dari tabel tersebut dapat kita hampir 80% sektor PDRB di Kabupaten Aceh Utara merupakan sektor non basis, sehingga tidak dapat dijadikan andalan dalam menopang perekonomiannya.

Namun pemerintah harus tetap konsisten pada sektor-sektor tersebut, sehingga diharapkan kedepan sektor non basis tersebut akan menjadi sektor basis baru dan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap PDRB total Kabupaten Aceh Utara

Selain itu Kabupaten Aceh Utara juga memiliki satu sektor basis baru pada tahun 2015 berdasarkan analisis LQ yaitu sektor pertanian, namun untuk mengoptimalkan ini diperlukan peran aktif pemerintah sehingga benar-benar menjadi harapan baru dalam menopang PDRB yang berimbang positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Aceh Utara focus pada sektor pertanian.

Kesimpulan

1. Desentralisasi Fiskal Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap IPM Kabupaten Aceh Utara
2. PDRB, Jumlah Penduduk Dan Belanja Daerah Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap PAD Kabupaten Aceh Utara
3. Sektor Basis (Potensial Secara Ekonomi) Di Kabupaten Aceh Utara Adalah Sektor
 - a. Pertambangan Dan Penggalian
 - b. Sektor Industri Pengolahan
 - c. Sektor Pertanian

Daftar Pustaka

- [1]. UU No. 23 Tahun 2014
- [2]. UU No. 33 Tahun 2004
- [3]. acehutarakab.bps.go.id
- [4]. Iba, Zainuddin, 2016, Desentralisasi Fiskal terhadap IPM Provinsi Aceh 2010-2015, STIE Kebangsaan, Bireuen.
- [5]. Sudjana. 2006. Metode Statistika. Bandung: Penerbit Tarsito
- [6]. Ghozali, Imam. 2011. Statistic Nonparametric. Semarang: BP Undip.
- [7]. Aceh.bps.go.id Yusnanto, 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sektor Industri Pengolahan Di Kabupaten Sukoharjo. Surakarta: Univ. Sebelas Maret
- [8]. Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta
- [9]. Hendayana.Rahcmat. 2003. Aplikasi Metode Location Questient (LQ) dalam Penentuan Komoditas Unggulan Nasional. Jurnal Informatika Pertanian. Vol 12